BAB IV

PERAN OPEN SOCIETY FOUNDATIONS TERHADAP DEMOKRASTISASI DI MYANMAR

Demokrasi sangat erat kaitannya dengan masyarakat sipil, perkembangan demokrasi pasti selalu terkait dengan perkembangan masyarakat sipil. Karena sesungguhnya mesin penggerak demokrasi adalah masyarakat sipil sendiri.. Dan perlu disadari penguatan masyarakat sipil harus dilakukan untuk memungkinkan rakyat bersatu dan menerapkan kekuatan sosialnya demi kehidupan yang lebih baik . Oleh karena itu kegiatan Open Society Foundations (OSF) di Asia Tenggara bertujuan untuk membantu transisi masyarakat Myanmar menuju masyarakat yang terbuka melalui program kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di negara-negara lain. Selain itu kegiatan OSF di Myanmar adalah untuk memperkuat proses demokrasi, meningkatkan hak asasi manusia, dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik, serta reformasi kebebasan media massa.[75]

A. Hambatan Dalam Proses Transisi Demokrasi di Myanmar

Di bawah pimpinan Jenderal Than Shwe, pemerintah Myanmar tercatat sebagai salah satu rezim yang paling tertutup di dunia. Berita

[75] Visi dan Misi Program Open Society Foundaions di Asia Tenggara selengkapnya

dan informasi mengenai Myanmar sangat terbatas sehingga negeri ini semakin jauh dari pemberitaan internasional. Berita yang muncul mengenai Myanmar, lebih banyak mengenai isu pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan militer Myanmar selama puluhan tahun. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar antara lain adalah penindasan terhadap suku-suku minoritas, kehidupan sebagian besar rakyat yang sangat miskin dan terjadinya kekerasan demonstran dalam demonstrasi tahun 1988 dan 2007.

Rakyat Myanmar mendambakan suatu pemerintahan yang demokratis dan ini berarti harus terjadi transisi pemerintahan rezim militer yang otoriter beralih ke pemerintahan sipil yang demokratis. Transisi dari pemerintahan non-demeokratis menuju pemerintahan demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Pada kasus tipikal kontemprorer, permulaan proses ditandai dengan terjadinya krisis dan akhirnya perpecahan dalam tubuh rezim non-demokratis. [76]

Dalam kasus Myanmar sejak pemerintahan junta militer berkuasa melalui jalan kudeta pada 1962, praktis negeri Myanmar oleh rezim militer berkuasa semakin sulit untuk membentuk pemerintahan yang

[76] Georg Sorensen. Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Berubah). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2003. Hlm 71.

demokratis karena solidnya rezim junta militer. Rezim militer hingga kini masih tetap berkuasa sebagai pemerintahan yang anti demokrasi.

Kehidupan demokrasi yang dinamis sangat diharapkan oleh rakyat Myanmar karena mereka selalu hidup dalam bayang-bayang aksi kemanusiaan yang diakhiri dengan cara kekerasan. Namun usaha untuk menuju kehidupan damai dan demokratis itu masih memiliki hambatan yang besar. Kekuatan militer yang didukung oleh faktor internal dan eksternal serta lemahnya pihak oposisi menjadikan proses rekonsiliasi demokrasi berjalan lamban.

Proses transisi demokratisasi di Myanmar di bawah bayang-bayang sepak terjang Rezim Militer yang sudah berkuasa lebih dari 45 tahun lamanya memang sangat rumit. Junta Militer pimpinan Jendral Than Shwe berusaha melanggengkan pemerintahan militernya, demi kepentingan utama agar rezimnya tetap berkuasa. Proses demokratisasi di Myanmar pun masih tetap tersamar. Namun tidak selamanya suatu gerakan menuntut pemindahan kekuasaan segera dari rezim militer ke sipil selalu merupakan suatu langkah politik yang cukup strategis dan efektif. Salah satu buktinya adalah gerakan yang dilancarkan oleh

Aung San Suu Kyi yang menuntut pergantian pemerintahan Rezim Militer Myanmar di bawah kepemimpinan Jenderal Than Shwe.[77]

Semakin jelas suatu gerakan kelompok oposisi LND itu memperjuangkan pemerintahan yang demokratis, justru semakin kuat pula pemerintahan rezim militer Myanmar dengan cara Junta Militer memberangus aksi demonstrasi damai dengan tindakan kekerasan yang menewaskan belasan demonstran. Selain kelompok oposisi LND, kaum Biksu juga memotori aksi demonstrasi yang sama karena dipicu oleh melambungnya harga bahan bakar minyak mencapai 500% yang harus ditanggung masyarakat di tengah ekonomi rakyat yang semakin merosot. Ironisnya korupsi dan pasar gelap merajalela di kalangan militer dan pejabat Myanmar.

Kondisi Masyarakat sipil di Myanmar juga tidak memungkinkan untuk memberikan perubahan maksimal dalam proses demokrasi karena kurangnya konsolidasi masyarakat sipil tersebut. Masyarakat sipil di Myanmar khususnya mahasiswa dan biksu cenderung berupaya melakukan proses transisi dengan melakukan kegiatan langsung seperti demostrasi terbuka. Sedangkan Partai NLD cenderung menggunakan cara yang lebih prosedural dan sistemik seperti menjadi oposisi pemerintah junta militer di parlemen dan menggalang massa dalam pemilihan umum.

---

[77] Hendrajit, Aksi Destablisasi di Myanmar , 7 Oktober 2007, dalam http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=10453 diakses pada tang- gal 25 Januari 2008.

Sedangkan lembaga sosial lain seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan cenderung bersifat pasif dalam melakukan proses transisi. Hal ini disebabkan karena pemerintah junta militer menutup akses informasi dan ekspresi publik dalam berpolitik. Kondisi tersebut menyebabkan kurang efektifnya gerakan masyarakat sipil dalam memberikan pengaruh transisi demokrasi.

B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Keterlibatan Open Society Foundations Dalam Proses Demokrasi di Myanmar

Open Society Foundations menempatkan prioritas utama dalam pembangunan demokrasi agar tercipta pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap hak-hak masyarakat. Untuk mencapai misi ini, OSF berusaha untuk membentuk kebijakan publik yang menjamin keadilan yang lebih besar dalam sistem politik, hukum, dan ekonomi. Atas dasar itulah OSF melakukan berbagai program penunjang demokrasi di Myanmar, OSF memiliki perhatian yang besar terhadap proses demokrasi khususnya di negara-negara berkembang, hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1974, ketika George Soros mendirikan Yayasan pertama di Hongaria sebagai tanda perlawanan terhadap Partai Komunis yang menutup akses informasi publik.[78]

Pasca runtuhnya Komunisme, Soros mendirikan lebih dari dua Yayasan di Polandia dan Rusia. Soros bergerak cepat untuk membuat

---

[78] Sejarah Open Society Foundations selengkapnya

Yayasan di seluruh Eropa Timur dan Asia Tengah dan secara tidak langsung memberikan kontribusi yang besar terhadap munculnya pemerintahan demokratis dan masyarakat yang secara substansial lebih terbuka di sebagian besar negara bekas kekaisaran Uni Soviet.[79]

Sebagai salah satu gerakan sosial yang dilembagakan untuk memfasilitasi reformasi masyarakat sipil dan pengenalan sistem demokrasi yang menurut istilah Mary Kaldor di sebut sebagai Global Civil Society versi Neo-Liberal, OSF melaksanakan berbagai program demokratisasi di Myanmar. OSF berperan aktif dalam proses perkembangan demokrasi di Myanmar adalah karena faktor perjuangan Aung San Suu Kyi yang menentang rezim militer sehingga mengundang simpati dunia internasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Open Society Foundations, Geogre Soros dalam kunjungannya ke Myanmar tanggal 26 Desember -3 januari 2012.[80] George Soros mengatakan :

" Yayasan saya selama 20 tahun telah melakukan dukungan terhadap gerakan demokrasi, tetapi ini adalah pertemuan pertama saya dengan Aung San Suu Kyi. Saya sangat dipandu oleh visinya dalam keterlibatan saya di Burma."

George Soros mengaku sangat terinspirasi dengan Aung San Suu Kyi dan aktivitas politiknya dalam memajukan demokrasi di Myanmar sejak tahun 1989. Bahkan George Soros berencana membangun kantor

[79] *Ibid.*
[80] Kunjungan Soros ke Myanmar selengkapnya di http://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/statement-george-soros-s-visit-burma. Diakses pada 16 Februari 2013.

resmi Open Society Foundations untuk Myanmar karena menganggap perkembangan demokrasi di Myanmar sangat penting.[81]

C. Peran Open Society Foundations Dalam Membangun Jaringan Sipil Global di Myanmar

Dalam upaya membangun demokrasi dan masyarakat sipil yang terbuka di Myanmar, Open Society Foundation melakukan berbagai kegiatan dan program-program yang menunjang keberhasilan akan terciptanya konsolidasi demokrasi dan masyarakat sipil tersebut. Program-program tersebut diharapkan bisa menjadikan masyarakat sipil semakin kuat dan berkembang serta menunjang terciptanya kehidupan demokrasi di Myanmar yang lebih baik.

Dalam proses tersebut tentu dibutuhkan jaringan-jaringan yang berskala internasional untuk saling melakukan proses penguatan demokrasi sehingga tercipta konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Jaringan Yayasan Soros atau Open Society Foundations sudah aktif sejak tahun 1974 dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah didunia untuk melakukan kegiatan yang mendorong perkembangan masyarakat sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan keterbukaan informasi.[82]

---

[81] Kunjungan Soros ke Myanmar selengkapnya di http://www.thejakartaglobe.com/bisworld/george-soros-to-open-burma-base-after-visit/489231. Di akses pada 16 Februari 2013.

[82] Sejarah Open Society Foundations selengkapnya di

Open Society Foundations termasuk lembaga masyarakat terbuka di New York, Budapest, London, Paris dan Brussels serta negara dan yayasan regional yang aktif di lebih dari tujuh puluh negara di seluruh dunia. Semua entitas ini bekerja sama secara informal sebagai dasar-dasar penguatan proses masyarakat yang terbuka, tapi ditetapkan dan diatur secara individual sesuai dengan undang-undang negara di mana negara tersebut berada.[83]

Soros Foundations bertujuan untuk mendukung aktivitas-aktivitas sosial di berbagai penjuru dunia banyak mendapat perhatian internasional setelah terjadinya krisis moneter tahun 1997 di Asia Tenggara dan setelah transformasi politik di Georgia pada tahun 2003. Prioritas dan kegiatan masing-masing cabang Soros Foundations ditentukan oleh badan pemimpin lokal di masing-masing negara, dengan dikonsultasikan kepada George Soros, pemilik yayasan ini. Secara umum organisasi Yayasan Soros terbagi di beberapa regional tertentu yaitu di Asia, Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Afrika, Eropa, Amerika Serikat dan Timur Tengah.[84] Berikut adalah rincian daftar nama negara dan kawasan serta yayasan Open Society Foundations yang tersebar di lebih dari 100 negara :

---

[83] Kebijakan Open Society Foundations tersedia di http://www.opensocietyfoundations.org/about/policies. Diakses pada 7 Januari 2013.

[84] Kantor dan yayasan Open Society Foundations tersedia di

Tabel 3. Daftar nama Yayasan Soros yang tersebar di benua Asia .

Nomor	Negara	Nama Yayasan
1	Afghanistan	Open Society Afghanistan
2	Kazakhstan	Soros Foundation–Kazakhstan
3	Kyrgyzstan	Soros Foundation–Kyrgyzstan
4	Indonesia	Tifa Foundation Indonesia
5	Mongolia	Open Society Forum–Mongolia
6	Pakistan	Foundation Open Society Institute–Pakistan
7	Tajikistan	Open Society Institute Assistance Foundation–Tajikistan

Sumber : Situs resmi Open Society Foundations tentang jaringan Yayasan Soros, 2013.

Open Society Foundations di Asia berfokus pada pembelaan hak asasi manusia, terutama untuk pekerja migran, buruh dan korban konflik. Peningkatan akses kesehatan masyarakat juga merupakan program utama Open Society Foundations di Asia. Selain itu Open Society Foundations juga berupaya mempromosikan reformasi pemilihan umum dan meningkatkan akses informasi publik.[85]

[85] Tentang Open Society Foundations Asia tersedia di http://www.opensocietyfoundations.

Tabel 4. Daftar nama Yayasan Soros di Eropa.

Nomor	Negara	Nama Yayasan
1	Albania	Open Society Foundation for Albania
2	Armenia	Open Society Foundations–Armenia
3	Azerbaijan	Open Society Institute Assistance Foundation–Azerbaijan
4	Belgia	Open Society European Policy Institute
5	Bosnia Herzegovina	Open Society Fund–Bosnia and Herzegovina
6	Bulgaria	Open Society Institute–Sofia
7	Republic ceko	Open Society Fund–Prague
8	Estonia	Open Estonia Foundation
9	Prancis	Open Society Institute–Paris
10	Georgia	Open Society Georgia Foundation
11	Hungaria	Open Society Institute–Budapest
12	Kosovo	Kosovo Foundation for Open Society
13	Latvia	Soros Foundation–Latvia
14	Macedonia	Foundation Open Society Institute–Macedonia
15	Moldova	Soros Foundation–Moldova
16	Montenegro	Foundation Open Society Institute–Representative Office Montenegro
17	Polandia	Stefan Batory Foundation
18	Rumania	Soros Foundation Romania
19	Slovakia	Open Society Foundation–Bratislava
20	Turki	Open Society Foundation–Turkey
21	Ukraina	International Renaissance Foundation
22	Inggris Raya	Open Society Foundation–London
23	Serbia	Fund for an Open Society–Serbia

Sumber : Situs resmi Open Society Foundations tentang jaringan Yayasan Soros, 2013.

Program-program utama Yayasan Soros di benua Eropa adalah tentang kebijakan Uni Eropa dan masyarakat muslim. Selain itu Program Open Society Foundation di Eropa juga berfokus pada isu

demokrasi, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan membantu masyarakat dalam proses integrasi Uni Eropa.

Tabel 5. Daftar nama Yayasan Soros yang tersebar di benua Amerika latin, Kepulauan Karibia dan Timur Tengah.

Nomor	Kawasan	Negara	Nama Yayasan
1	Amerika latin dan Kepulauan Karibia	Haiti	Fondation Connaissance et Liberte
2	Timur Tengah	Yordania	Arab Regional Office

Sumber : Situs resmi Open Society Foundations tentang jaringan Yayasan Soros, 2013.

Open Society Foundations regional Amerika Latin dan Kepulauan Karibia ini berusaha menyatukan kelompok-kelompok masyarakat sipil di Haiti dan membina aliansi internasional untuk mempromosikan perdamaian, pengembangan, dan revitalisasi perkotaan. [86] Organisasi yang juga dikenal sebagai *Fondation Connaissance et Libert* ini memainkan peran utama di Haiti sebagai pendukung gerakan kepemudaan, pendidikan dan seni serta menyediakan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak bencana alam, kekerasan politik dan kemiskinan. *Fondation Connaissance et Libert* juga terlibat pada proyek-proyek jangka panjang seperti promosi Taman Martissant sebagai Taman Nasional untuk beberapa proyek lingkungan seperti sanitasi, pengolahan air,

[86] Tentang Open Society Foundations Amerika Latin tersedia di http://www.opensocietyfoundations.org /about/offices-foundations/fondation-connaissance-et-liberte. Di akses pada Selasa 30 Oktober 2012.

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan bisnis lokal. *Fondation Connaissance et Libert* juga membantu dalam membangun 50 jaringan Perpustakaan nasional dari komunitas lokal. Program ini sangat membantu anak-anak dan pemuda dari masyarakat miskin untuk mendapatkan akses informasi dan teknologi.[87]

Selain yayasan regional di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia Organisasi Yayasan Soros juga aktif di Timur Tengah. Organisasi Yayasan Timur Tengah bertujuan untuk membangun masyarakat yang toleran dan melindungi hak asasi manusia. OSF regional Arab juga mendukung berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil, pusat penelitian, universitas, dan organisasi media di seluruh dunia Arab.[88]

OSF regional Arab yang didirikan pada tahun 2006 ini berbasis di Amman, Yordania. Yayasan ini bekerja dalam enam wilayah program yang berbeda untuk memberikan dukungan finansial dan teknis kepada individu dan organisasi yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan penegakan hukum. Organisasi ini juga memberikan bantuan teknis kepada mereka yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan masyarakat marjinal

---

[87] *Ibid.*

[88] Tentang Open Society Foundations Timur Tengah, tersedia di http://www.opensocietyfoundations.org/about/officesfoundations/arabegionaloffice/background. Diakses pada Selasa 30 Oktober 2012.

serta berupaya mendorong media independen dan keterbukaan informasi.[89]

Tabel 6. Daftar nama Yayasan Soros yang tersebar di benua Afrika.

Nomor	Kawasan	Nama Yayasan
1	Afrika Timur	Open Society Initiative for Eastern Afrika
2	Afrika Barat	Open Society Initiative for West Africa
3	Afrika Selatan	Open Society Foundation for South Africa
4	Southern Africa	Open Society Initiative for Southern Africa

Sumber : Situs resmi Open Society Foundations tentang jaringan Yayasan Soros, 2013.

Open Society Foundations di Afrika berusaha untuk menghilangkan persepsi negatif tentang Afrika, mendukung pemerintahan demokratis, reformasi peradilan pidana, dan advokasi tentang kebijakan pemerintah dalam peraturan sumber daya alam. Organisasi Yayasan Soros di Afrika juga bekerja sama dengan pemerintah lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mempromosikan media independen dan reformasi kesehatan masyarakat khususnya program HIV AIDS.[90]

[89] *Ibid.*

[90] Tentang Open Society Foundations Afrika tersedia di http://www.opensocietyfoundations.org

Tabel 7 . Daftar nama Yayasan Soros yang tersebar di benua Amerika.

Nomor	Negara bagian	Nama yayasan
1	Baltimore	Open Society Institute–Baltimore
2	New York	Open Society Institute–New York
3	Washington, D.C.	Open Society Institute–Washington, D.C.

Sumber : Situs resmi Open Society Foundations tentang jaringan Yayasan Soros, 2013.

Organisasi Open Society Foundations di Amerika Serikat bertujuan untuk mencapai perkembangan masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya. Yayasan ini juga melindungi hak asasi manusia serta mempromosikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.[91]

Yayasan Soros aktif berperan di seluruh wilayah Amerika Serikat, salah satunya adalah Open Society Institute New York yang merupakan pusat dari seluruh Jaringan Yayasan Soros. Organisasi ini melaksanakan program-program seperti *The Public Health Program, The Burma Project/Southeast Asia Initiative, The Scholarship Programs* dan *U.S. Programs.*[92]

[91] Yayasan Soros di Amerika Serikat tersedia di http://www.opensocietyfoundations.org /regions/united-states. Di akses pada Selasa 30 Oktober 2012.

[92] Tentang Open Society Foundations New York tersedia di

Yayasan kedua yaitu Open Society Institute Washington D.C. Organisasi ini terlibat dalam advokasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam isu-isu domestik dan internasional, termasuk isu kebebasan masyarakat sipil, hak asasi manusia, transparansi dana dan akuntabilitas pemerintah.[93]

Selain kedua Yayasan tesebut, organisasi Yayasan Soros juga mempunyai jaringan lain yaitu Open Society Institute–Baltimore. Yayasan yang didirikan pada tahun 1998 ini berfokus pada ide-ide inovatif untuk melaksanakan keadilan sosial, kegiatan anak-anak sekolah dan ketidakadilan sistem peradilan pidana.[94]

Open Society Foundations merupakan organisasi gerakan global dalam mengkampayekan perubahan masyarakat sipil dan demokrasi. Kegiatan organisasi yang berlangsung sejak dekade 80-an ini telah melakukan berbagai macam insiatif dan program-program pembaharu masyarakat sipil, demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam upaya tersebut OSF telah melakukan berbagai program dan kerjasama baik dengan, Organisasi Internasional maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Myanmar.

---

[93] Tentang Open Soicety Foundations Washington tersedia di http://www.opensocietyfoundations.org /about/offices-foundations/open-society-institute-washington-dc. Diakses pada Selasa 30 Oktober 2012.

[94] Tentang Open Soicety Foundations Baltimore tersedia di http://www.opensocietyfoundations.org /about/offices-foundations/open-society-institute-

Di Myanmar Jaringan Yayasan Soros yang aktif berperan dalam proses tarnsisi demokrasi adalah Tifa foundations yang bekerja sama dengan Altsean Burma, Open Society Institute New York yang juga menjalin kerjasama pendidikan dengan Mario Eunadi Center For International Studies. Open Society Institute Washington juga memberikan pengaruh khususnya dibidang publikasi dan dokumentasi kasus pelanggaran Ham di Myanmar yang terbentuk dalam pameran photography Moving Wall 19.

Open Society Foundations merupakan bagian dari jaringan Yayasan Soros yang berusaha untuk terus melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di dunia dan berada digaris terdepan kampanye global dalam mempromosikan pemerintahan demokratis, perlindungan hak-hak minoritas, dan kebebasan sipil di Myanmar. Di Myanmar Jaringan Yayasan Soros yang aktif berperan dalam proses tarnsisi demokrasi adalah Tifa foundations yang bekerja sama dengan Altsean Burma, Open Society Institute New York yang juga menjalin kerjasama pendidikan dengan Mario Eunadi Center For International Studies. Open Society Institute Washington juga memberikan pengaruh khususnya dibidang publikasi dan dokumentasi kasus pelanggaran Ham di Myanmar yang terbentuk dalam pameran photography Moving Wall 19.

Selain dengan negara-negara tersebut, OSF juga melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa organisasi regional di Asia

pada tahun 1998, jaringan Soros mendanai dua lembaga non pemerintah (NGO), yaitu Tifa Foundation dan International Transperancy. Tifa Foundations didirikan pada tanggal 18 Desember 2000 oleh aktivis NGO dan akademisi melalui dana dari bantuan jaringan yayasan Soros.[95] Tujuannya untuk mendorong Indonesia dan masyarakatnya menjadi "lebih terbuka" yang menghormati keragaman, menjunjung tinggi penegakan hukum, keadilan dan persamaan. Dengan dukungan dana Soros, dalam waktu singkat Tifa berkembang pesat. Yayasan ini mengklaim sebagai sebuah komunitas yang meliputi segala lapisan masyarakat, baik unsur pemerintah hingga sektor bisnis.

Upaya memperkuat masyarakat sipil ini dilakukan melalui melalui pemberian dana hibah, penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk merespon kondisi darurat yang mengancam keberadaan masyarakat terbuka dan mempercepat pencapaian program, termasuk memberikan bantuan teknis, serta membangun *center of excellence* bagi masyarakat sipil melalui produksi dan *sharing* pengetahuan.[96]

Tifa foundations telah melakukan program kemitraan dengan Altsean Burma yang diprakarsai oleh ketua Tifa Foundations Yuli

---

[95] Sejarah Tifa Foundations diakses melalui http://www.tifafoundation.org /index.php?comp=home.detail.30&lang=id pada Senin 4 Maret 2013.

[96] Tentang jaringan Yayasan Soros, lihat lebih lanjut di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=4489&type=2#.UTQ1cTevg2c. Diakses pada selasa 5 Maret 2013.

Ismartono, yang juga merupakan dewan penasehat Altsean Burma.[97] Altsean Burma merupakan salah satu organisasi dari jaringan *Burma Partnership*. *Burma Partnership* adalah sebuah jaringan organisasi-organisasi di seluruh kawasan Asia Pasifik, yang melakukan advokasi dan memobilisasi sebuah gerakan bagi demokrasi dan hak asasi manusia di Burma. [98]

Burma Partnership, sebelumnya dikenal sebagai *Asia-Pacific Peoples' Partnership on Burma* (APPPB), dibentuk dalam sebuah konferensi regional bertema *"Democratic Change by the People: Asia Pacific Partnership on Burma"*(Perubahan Demokratis oleh Rakyat: Kemitraan Asia Pasifik untuk Burma) di Chiang Mai, Thailand pada bulan Februari 2006. Konferensi tersebut diprakarsai dan diselenggarakan oleh *Forum for Democracy in Burma* (FDB) bekerjasama dengan *Alternative ASEAN Network on Burma* (Altsean-Burma) dan *Asian Forum for Human Rights and Development* (Forum-Asia).[99]

Konferensi tiga hari tersebut diadakan untuk membangun kemitraan di seluruh kawasan Asia Pasifik, untuk menyusun dan menjalankan sebuah strategi bersama untuk memobilisasi sebuah

---

[97] Pengurus Tifa Foundations tersedia di http://www.tifafoundation.org /index.php?comp= home. detail.33. Diakses pada Rabu 6 Maret 2013.

[98] Tentang Burma Partnership dan Altsean Burma di

gerakan masyarakat sipil yang terkoordinasi bagi Myanmar, serta untuk memperkuat dukungan masyarakat sipil dari *ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC, Kaukus Antarparlemen ASEAN untuk Myanmar) dan kaukus-kaukus parlemen untuk Burma di tingkat nasional.

Di Amerika OSF juga menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok organisasi dan asosiasi, salah satunya dengan Mario Einaudi Center for International Studies, yaitu sebuah lembaga pemerhati pendidikan dunia yang berbasis di Universitas Cornell, New York. Kerjasama ini terjalin dalam bentuk program Southeast Asia Program (SEAP), program ini terbentuk karena banyaknya permintaan untuk akses informasi dan pelatihan tentang Myanmar dan kelompok-kelompok etnis di Negara tersebut. Komitmen program ini adalah untuk menyediakan sumber daya pendidikan di Myanmar khususnya bagi etnis terpinggirkan melalui perpustakaan dan organisasi-organisasi masyarakat. Selain itu program ini juga menawarkan lokakarya pengembangan profesionalitas guru dan presentasi untuk kelompok komunitas dan pengusaha yang fokus pada latar belakang budaya dan sejarah Myanmar.[100]

---

[100] Tentang Program Southeast Asia (SEAP) diakses melalui http://seap.einaudi.cornell.edu/burma-karen_project pada Senin 4 Maret 2013.

Di bidang media massa OSF melakukan kerjasama dengan *Democratic Voice of Burma, yaitu* organisasi multimedia independen di Myanmar yang berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap dunia jurnalistik. *Democratic Voice of Burma* menyediakan berita-berita dan informasi mengenai Myanmar kepada pihak luar melalui radio, program televisi dan internet. Kerjasama OSF dan *Democratic Voice of Burma* terbentuk dalam proses pembuatan film dokumentasi *Burma VJ: Reporting from a Closed Country* sebagai nominasi film dokumenter di Academi Award.

Latar belakang terjadinya program kemitraan ini adalah banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer terhadap jurnalis dan media massa di Myanmar. Banyak wartawan *Democratic Voice of Burma* dipenjarakan sejak tahun 2007. Pada Desember 2009, jurnalis Hla Hla Win dijatuhi hukuman 27 tahun penjara dan Januari 2010, jurnalis lain Ngwe Bumn Lin dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Atas dasar itulah *Democratic Voice of Burma* banyak melakukan kerja sama dengan asosiasi internasional seperti wartawan internasional dan komite perlindungan wartawan. *Democratic Voice of Burma juga* bekerja sama dengan OSF untuk meluncurkan sebuah kampanye melalui film dokumenter *Burma VJ: Reporting from a Closed Country*

untuk mengerahkan dukungan dari masyarakat internasional terhadap kondisi media massa di Myanmar.[101]

Jaringan sipil global selain dari jaringan Yayasan soros yang ikut secara aktif membantu proses demokratisasi di Myanmar adalah KWAT *(Kachin Women's Association of Thailand) yaitu* LSM lokal yang berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan. Selain itu KWAT juga mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Negara Bagian Kachin dan menpublikasikan pelanggaran tersebut sehingga menjadi perhatian masyarakat internasional.[102]

Konflik di Negara Bagian Kachin telah menyebabkan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang Kachin di Myanmar, terutama oleh Angkatan Darat Militer Myanmar. Pelanggaran tersebut termasuk serangan terhadap penduduk sipil, pembunuhan, kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan dan penyitaan tanah serta kerja paksa. Melihat kondisi tersebut KWAT berupaya Memberikan Solusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan laporan mengenai apa yang terjadi di Negara Bagian Kachin , meningkatkan

---

[101] Program kemitraan OSF dengan DVB lihat di http://www.opensocietyfoundations.org/voices/where-journalists-are-criminals. Di akses pada Kamis 7 Maret 2013.

[102] Pelanggaran Ham Kachin tersedia di http://www.opensocietyfoundations.org/

bantuan asing , mengatur aksi unjuk rasa di konsulat AS dan China dan bekerja dengan media dan PBB untuk meningkatkan kesadaran akan konflik tersebut. Bahkan salah satu anggota KWAT bersaksi dan memberikan keterangan pada saat Kongres AS. Melalui upaya ini, KWAT telah berhasil membangkitkan kesadaran internasional tentang konflik yang terjadi di Kachin. [103]

D. Program Demokratisasi Open Society Foundations di Myanmar

Dalam konteks demokrasi di Myanmar, sistem politik yang terbaik bagi masyarakat yang ingin melakukan transisi kearah masyarakat terbuka adalah sistem pemerintahan yang demokratis karena didalamnya orang bebas memilih dan mengubah pemerintahan. Bentuk pemerintahan demokratis dianggap lebih cocok dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya karena menjamin kebebasan individual untuk memenuhi kebutuhan sosialnya.[104]

Oleh karena itu Open Society Foundations sebagai sebuah organisasi non-pemerintah yang ingin menyebarkan gagasan demokrasi melaksanakan berbagai kegiatan dan program-program yang menunjang keberhasilan akan terciptanya konsolidasi demokrasi dan masyarakat sipil tersebut. Kegiatan dan program OSF tidak hanya terbatas di negara-negara yang terkebelakang secara sosial, ekonomi dan kehidupan politik, tetapi juga di negara-negara maju yang sudah berkembang kehidupan

---

[103] *Ibid.*

[104] George Soros Zaman Kenisbian Konsekuensi Perang Terhadap Teror. Penerbit

sosial dan politiknya. Program - program tersebut diharapkan bisa menjadikan masyarakat sipil semakin kuat dan berkembang serta menunjang terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih baik. Berikut adalah peran dan program-program yang telah dilakukan oleh OSF dalam proses demokrasi Myanmar :

1. *Burma Project/Southeast Asia Initiative*

Burma Project/Southeast Asia Initiative mendukung masyarakat sipil dalam memajukan kebebasan berpendapat, menjamin akuntabilitas pemerintah dan memberdayakan hak-hak kelompok marginal. Program yang berlangsung sejak tahun 1994 ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran Internasional tentang kondisi demokrasi di Myanmar.[105] *Burma Project/Southeast Asia Initiative* juga terlibat dan mendukung program-program organisasi regional untuk melakukan transformasi masyarakat terbuka dan membantu para aktivis untuk menyuarakan kepada publik tentang konstitusi dan referendum yang ilegal, pemilihan umum yang tidak demokratis dan penindasan terhadap lawan-lawan politik pemerintahan junta militer. Dan program ini telah menjawab ketidakmampuan rezim junta militer dalam menanggapi kasus darurat seperti topan Nargis pada tahun 2008 dengan mendukung kelompok-kelompok sipil untuk menyediakan makanan dan obat-obatan.[106]

---

[105] Program *Burma Project SoutheastAsia Initiative* lihat selengkapnya di http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/burma-projectsoutheast-asia-initiative. Diakses pada 7 Januari 2013.

[106] Tentang *Burma Project SoutheastAsia Initiative* selengkapnya di http://www.opensocietyfoundations.org /about/programs/burma-projectsoutheast-

Program ini merupakan wujud perhatian OSF terhadap isu domestik di Myanmar. Rezim pemerintahan junta militer yang dinilai sangat refresif dalam mempertahankan kekuasaan menjadikan perkembangan demokrasi di Myanmar mengalami kebuntuan, atas dasar itulah OSF berusaha memberikan peran dalam perkembangan demokrasi di Myanmar melalui program *Burma Project/Southeast Asia Initiative*.

Program *Burma Project/Southeast Asia Initiative* ini mendapatkan perhatian utama dari pendiri yayasan Open Society Fundations, George Soros. Soros mengunjungi Myanmar dalam kapasitasnya sebagai filantropis dan pendukung gerakan masyarakat terbuka di seluruh dunia. Kunjungan yang dilaksanakan pada 26 Desember 2011 tersebut telah mengagendakan Soros bertemu dengan berbagai orang yang terlibat dalam proses reformasi, termasuk wakil-wakil masyarakat sipil dan Presiden U Thein Sein. Soros juga bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan menyelenggarakan diskusi tentang proses reformasi yang berlangsung di Myanmar.[107]

---

[107] Kunjungan George Soros di Myanmar selengkapnya di

Pada kunjungan tersebut Soros mengatakan :

" Saya sangat didorong oleh tanda-tanda kebebasan politik di Burma, reformasi yang mulai terlihat dewasa ini. Namun ada kesenjangan yang besar antara kehendak dan kondisi dilapangan.[108] "

Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa George Soros selaku pendiri dari Open Society Foundations memberikan perhatian yang besar terhadap Myanmar dan program *Burma Project/Southeast Asia Initiative*. Bahkan George Soros berencana membangun kantor resmi Open Society Foundations di Myanmar karena menganggap perkembangan demokrasi di Myanmar sangat penting.[109]

Semua upaya tersebut berusaha diwujudkan dengan program *Burma Project/Southeast Asia Initiative*, dalam program ini Open Society Foundations menempatkan prioritas utama sebagai Global Civil Society versi neoliberal yang memfasilitasi berbagai perubahan perubahan reformasi sosial dan demokrasi. Dalam inisiatif tersebut, OSF meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat sipil dengan Association of Southeast Asian Nations, khususnya dalam pengembangan perlindungan hak asasi manusia. Selain melaksanakan

---

[108] George Soros to Open Burma Base After Visit lihat selengkapnya di http://www.thejakartaglobe.com /bisworld/george-soros-to-open-burma-base-after-visit/489231. Di akses pada Senin 4 Maret 2013.

[109] Kunjungan Soros ke Myanmar selengkapnya di http://www.thejakartaglobe.com

kegiatan di Myanmar program ini juga melaksanakan beberapa kegiatan di berbagai negara Asia Tenggara.

Di Thailand, program *Burma Project/Southeast Asia Initiative* mendukung kelompok-kelompok yang mempromosikan hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik dan memberikan pelatihan hukum pada etnis minoritas dalam isu-isu keadilan sosial serta mengembangkan radio dan internet yang berbasis jurnalis sipil. Di Malaysia, program ini telah berinisiatif mendukung pelatihan untuk pengacara dalam peningkatan dan dokumentasi HAM, populasi migran, dan memperluas kebebasan berekspresi. Di Kamboja, program ini bekerja sama dengan dengan Open Society Justice Initiative untuk berfokus dalam pendidikan hukum dan membuat pengadilan yang dapat diakses oleh orang-orang yang tersebar di seluruh wilayah Kamboja serta pengembangan radio dan internet yang menggunakan bahasa Kamboja.

Selain itu *Burma Project/Southeast Asia Initiative* juga melakukan berbagai kegiatan seminar berskala internasional dan event-event diskusi yang membahas tentang permasalahan demokrasi di Myanmar. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain seminar-seminar internasional yang mengambil berbagai macam pembahasan tentang permasalahan demokrasi di Myanmar seperti *Crisis in Burma: In Search of a Unified International Response, Update on the Burma Uprising, Why Are the Burmese Generals Still in Power?, Exposing Statelessness: Understanding the Plight of Burma's Rohingya*. Dalam kegiatan seminar

tersebut diundang berbagai macam tokoh lintas negara yang terdiri dari tokoh LSM, pendiri organisasi, jurnalis dan pengamat politik internasional. Kegiatan yang di prakarsai oleh *Burma Project/Southeast Asia Initiative* ini membahas tentang perkembangan demokrasi dan rekonsiliasi masyarakat sipil di Myanmar sehingga diharapkan perkembangan masyarakat terbuka dan rekonsiliasi masyarakat sipil dapat terwujud.[110]

2. *Documentary Photography Project*

Dalam masyarakat terbuka, jaminan atas hak berekspresi, baik jaminan untuk bersuara dan berpendapat, menyebarluaskan informasi dan mendapatkan informasi adalah hal yang utama. Karenanya, jaminan atas kebebasan berekspresi, terutama melalui media massa, adalah hal yang utama yang ingin terus dijaga, melalui program *Documentary Photography Project* OSF berupaya memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi, dan memfasilitasi kebebasan menyebarkan informasi dan penyediaan informasi yang memenuhi kebutuhan publik.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa institusi media khususnya di Myanmar belakangan ini menjadi rentan terhadap kriminalisasi dan seringkali menjadi korban tindakan kekerasan. Ada banyak pilihan media yang bisa digunakan untuk mempromosikan nilai,

[110] Program dan event *Burma Project/Southeast Asia Initiative* lihat lebih lanjut di http://www.opensocietyfoundations.org/work-writing-appearances/22801/all. Diakses pada Kamis 7 Maret 2013.

dan masyarakat juga tidak selalu menyandarkan diri pada media-media konvensional (surat kabar, buku dan film) namun juga pada media-media baru, seperti situs web, blog, jejaring sosial dan aktivitas budaya (*performing arts, murals*) maupun pameran fotography.

Melalui hibah dan pameran fotografi, program *Documentary Photography Project* mendukung fotografi sebagai media mobilisasi massa dalam isu keadilan dan hak asasi manusia. Sejak tahun 1998, *Documentary Photography Project* telah memberikan dana hibah dan melaksanakan pameran foto internasional yang dihadiri lebih dari 300 fotografer yang meneliti isu tentang masyarakat terbuka. *Documentary Photography Project* juga mendanai proyek fotografi sebagai mekanisme untuk mendorong keterlibatan sipil, kesadaran masyarakat dan perhatian media.[111] Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin modern diharapakan fotografi mempunyai peran yang signifkan dalam dokumentasi maupun publikasi sosial, atas dasar itulah Open Society Foundations berusaha menjadikan media fotografi sebagai upaya mobilisasi massa dalam isu-isu domestik yang strategis.

Berdasarkan atas upaya tersebut maka diadakan pameran karya seni yang mempunyai tema *The "Blood Rubies" of Burma.* Pameran yang dilaksanakan di Museum Field, Chicago ini mengeksplorasi perbedaan antara hak asasi manusia dan perdagangan permata Myanmar

[111] Tentang *Documentary Photography Project Program* selengkapnya di http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/documentary-photography-project/background . Diakses pada Senin 29 Oktober 2012.

secara global. Pameran ini didukung oleh OSF dan dikoordinasi oleh fotografer Christian Holst dan Leslie Thomas yang juga penerima hibah dari OSF untuk program *Documentary Photography Project.*[112]

Program ini dianggap sangat penting dalam proses demokratisasi dan mobilisasi masyarakat sipil di Myanmar, hal ini diungkapkan oleh direktur dari Documentary Photography Project, Amy Yenkin dalam wawancara mengenai latar belakang program ini. Amy Yenkin mengatakan bahwa :

" Meskipun banyak perubahan positif tentang kasus-kasus politik di Myanmar namun masih tidak ada jaminan tentang kebebasan organisasi, asosiasi, ataupun kebebasan berpendapat . Di daerah konflik di Myanmar Timur, masyarakat masih menghadapi kerja paksa, pembunuhan, dan kekerasan seksual, kami mendengar dari kelompok-kelompok advokasi dan kemanusiaan sangat sulit untuk mendapatkan perhatian internasional terhadap kondisi di Myanmar. Setelah berbicara dengan peneliti *Human Rights Watch*, maka muncullah ide untuk melakukan kegiatan pameran visual karya seni dengan batu-batu permata sebagai cara untuk menceritakan kisah tentang pelanggaran hak asasi manusia di Burma."[113]

Di Myanmar potret mengenai kasus demokrasi dan keadilan hukum juga didokumentasikan melalui gambar tokoh-tokoh nasional Myanmar seperti Aung San Suu Kyi dan beberapa orang mantan tahanan negara. Fotografer James Mackay menciptakan Konsep Fotography *"Even Though I'm Free, I Am Not"*. Potret pembangkang politik dari Myanmar yang berpose dengan nama-nama tahanan politik yang ditulis

---

[112] Tentang program *Blood Rubies of Burma*, lihat di http://www.opensocietyfoundations.org/voices/blood-rubies-burma. Di akses pada Senin 29 Oktober 2012.

[113] Latar belakang pameran *Blod Rubies of Burma* lihat selengkapnya di

pada telapak tangan mereka yang menandakan bahwa kondisi hukum dan keadilan di Myanmar sangat tidak memihak rakyat.

Solidaritas para tahanan politik ini merupakan potret nyata kasus politik dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil di Myanmar. Tindakan pemerintahan junta militer yang sangat tidak demokratis tersebut telah memicu para tahanan politik ini untuk menyuarakan keadilan. Seri dokumentasi foto ini merupakan bagian dari pameran Moving Walls 19. Moving Walls 19 adalah sebuah dokumentasi tahunan tentang pameran fotografi yang membahas tentang keadilan sosial dan isu- isu hak asasi manusia oleh Open Society Foundations di New York dan Washington, D.C.Pameran yang mulai aktif sejak tahun 1998 ini mengeksplorasi pengalaman orang yang mengalami diskriminasi, menyoroti tindakan refresif pemerintah, dan advokasi terhadap keadilan.[114]

Pada masa perang dingin masalah demokrasi merupakan masalah internal suatu negara, namun setelah perang dingin berakhir masalah demokrasi dianggap sebagai bentuk ancaman keamanan non-konvesional yang harus dihadapi oleh Negara-Negara dunia ketiga dan Negara-Negara berkembang. Reorientasi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat William Bill Clinton yang memberikan

---

114 Tentang program Moving Walls 19, lihat lebih lanjut di http://www.opensocietyfoundations.org/moving-walls/19. Di akses pada senin 4 Maret 2013.

perhatian lebih besar dalam masalah lingkungan hidup, penegakan HAM, dan demokratisasi. Dengan adanya reorientasi tersebut Amerika Serikat berhasil menjadikan isu-isu urusan domestik suatu negara menjadi urusan internasional.

Kemajuan teknologi yang mengakibatkan cepatnya arus informasi dan munculnya desakan dari berbagai kelompok masyarakat, seiring pula dengan terjadinya peningkatan kualitas hidup rakyat akibat keberhasilan pembangunan ekonomi. Semakin kuatnya jaringan kerjasama antar LSM dibelahan dunia mengakibatkan pelanggaran HAM dan demokratisasi yang terjadi di suatu negara akan cepat menyebar ke negara lain. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan pergeseran konsep masalah demokrasi.[115]

Dengan adanya kebijakan dan pola politik luar negeri Amerika Serikat tesebut maka peranan Open Society Foundations terhadap proses demokratisasi di Myanmar mendapat perhatian internasional. Upaya Open Society Foundations untuk terus melakukan pendekatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat Myanmar guna mengembangkan demokrasi merupakan prasyarat eksistensi organisasi ini di Myanmar. Dengan memaparkan program-program dan jaringan- jaringan organisasi Open Society Foundations di Myanmar

[115] Anna julinati, " ASEAN dan Masalah Hak Asasi Manusia". Global Jurnal Politik internasional, No 1, September 2000, hlm 45.

akan terlihat seberapa besar peranan Open Society Foundations dan pengaruhnya terhadap proses perkembangan demokrasi di Myanmar.

Demokrasi diciptakan dengan cara-cara demokratis yaitu melalui perundingan, kompromi dan perjanjian. Selain itu demokrasi juga diciptakan melalui demonstrasi, kampanye dan pemilihan umum, serta penyelesaian perbedaan tanpa kekerasan.[116] Menyadari akan pentingnya proses tersebut Open Society Foundations sebagai Global Civil Society melakukan program-program yang berbasiskan masyarakat sipil yaitu program *Documentary Photography ProjectThe "Blood Rubies" of Burma* dan *Burma Project/Southeast Asia Initiative*. Dalam program tersebut Open Society Foundations mendukung masyarakat sipil dalam memajukan kebebasan berpendapat, menjamin akuntabilitas pemerintah dan memberdayakan hak-hak kelompok marginal. Selain itu program-program tersebut juga menjadi media mobilisasi massa dalam isu keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam upaya membangun demokrasi dan masyarakat sipil yang terbuka, Open Society Foundations sebagai sebuah gerakan sosial Global Civil Society Versi Neo liberal berupaya melakukan berbagai kegiatan dan program-program yang menunjang keberhasilan akan terciptanya konsolidasi demokrasi dan masyarakat sipil tersebut. Global civil society versi neo liberal merupakan kategorisasi menurut Mari Kaldor, dalam

yang bersifat dilembagakan dan menghendaki proses terciptanya masyarakat sipil yang semakin kuat dan berkembang serta menunjang terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih baik versi masyarakat barat.

Dalam proses tersebut dibutuhkan jaringan-jaringan yang berskala internasional untuk saling melakukan proses penguatan demokrasi sehingga tercipta konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Semua entitas ini bekerja sama secara informal sebagai dasar-dasar penguatan proses masyarakat yang terbuka, tapi ditetapkan dan diatur secara individual sesuai dengan undang-undang negara di mana negara tersebut berada. [117]

Berbagai program yang dijalankan serta keaktifan organisasi jaringan Yayasan Soros dalam mengupayakan kehidupan demokrasi yang lebih baik dapat dikatakan memiliki peranan yang besar, dengan katalisator Open Society Foundations telah melakukan peran yang cukup efektif dan berpengaruh dalam pengembangan demokrasi dan rekonsiliasi masyarakat sipil di Myanmar. Kontribusi OSF dalam proses demokratisasi di Myanmar diwujudkan dalam berbagai kerjasama dengan jaringan Yayasan Soros yang tersebar di seluruh dunia. Kerjasama tersebut meliputi berbagai program-program maupun publikasi dan dokumentasi tentang berbagai perkembangan demokrasi di Myanmar.

---

[117] Kebijakan Open Society Foundations tersedia di

Upaya memperkuat masyarakat sipil ini dilakukan melalui melalui pemberian dana hibah, penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk merespon kondisi darurat yang mengancam keberadaan masyarakat terbuka dan mempercepat pencapaian program, termasuk memberikan bantuan teknis, serta membangun *center of excellence* bagi masyarakat sipil melalui produksi dan *sharing* pengetahuan. Melalui kegiatan kemitraan dan publikasi tentang kondisi demokrasi di Myanmar OSF telah mampu meningkatkan perhatian dunia internasional terhadap kondisi internal di Myanmar, sehingga mengakibatkan kepedulian dan peningkatan hubungan bilateral antara negara Myanmar dengan negara-negara lain. Selain itu peran OSF di Myanmar berdampak pada pembukaan diri Myanmar pada dunia internasional yang salah satunya ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilary Clinton dan kunjungan pendiri Open Society Foundations